



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI DI YOGYAKARTA
TANGGAL 30 JANUARI 2020**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Komisi II DPR RI ini adalah dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Dewan, yaitu fungsi Pengawasan. Secara khusus Kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terkait seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019-2020.

Sebagaimana diketahui Pemerintah telah mengumumkan penerimaan CPNS tahun 2019 dan menetapkan pelaksanaan tersebut pada bulan-bulan mendatang secara bersamaan di seluruh instansi pusat dan daerah, kota/kabupaten serta provinsi. Penerimaan CPNS 2019 yang dilakukan secara serentak harus diimbangi dengan kesiapan setiap daerah untuk melaksanakan proses penerimaan CPNS serta koordinasi yang terus menerus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Persiapan tersebut terkait dengan formasi dan jumlah kebutuhan CPNS.

Dalam kerangka tersebut, maka proses penerimaan dan pembinaan karir PNS harus dipastikan memenuhi syarat-syarat administrasi dan manajemen personil yang baik, seperti analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kinerja, evaluasi jabatan. Proses administrasi dan manajemen personil yang baik akan mewujudkan budaya birokrasi Indonesia yang profesional. Sehingga memudahkan langkah dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia.

Hadirnya UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, telah memberikan payung hukum adanya PNS dan PPPK sebagai pelaksana birokrasi. Akan tetapi PPPK ternyata tidak mampu memberikan solusi terhadap persoalan tenaga honorer yang demikian kompleks. Demikian kompleksnya persoalan

honorers, karena terkait langsung dengan persoalan politik dalam negeri. Dimana reformasi telah memunculkan desentralisasi politik yang mendorong hadirnya kemudahan bagi penguasa daerah mengangkat honorers di daerah. Menurut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo selaku Plt Gubernur Sumatera ketika kunjungan kunspek Panja ASN tahun 2018, pemilu 1999 dan pilkada langsung 2005 telah mendorong pengangkatan tenaga honorers di daerah. Sehingga jumlah honorers meningkat tajam sampai jutaan orang.

Atas persoalan tersebut maka lahir PP 48 tahun 2005 dan PP No 56 tahun 2012 yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan honorers tersebut di atas. Sehingga lahir istilah tenaga honorers kategori 1 dan kategori 2 untuk mendefinisikan honorers seiring lahirnya Peraturan Pemerintah di atas. Akan tetapi, ternyata payung hukum tersebut tidak mampu mengurai masalah honorers secara komprehensif sehingga akhirnya pemerintah melahirkan PP No 49 tahun 2019 tentang manajemen PPPK untuk menyelesaikan persoalan honorers agar sesuai dengan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN. Hanya saja, hingga saat ini kehadiran PP no 49 th 2019 ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan honorers secara tuntas.

Dalam penerimaan CPNS tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi pihak penyelenggara rekrutmen CPNS tahun 2019. Dengan menyiapkan infrastruktur portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan pelaksanaan seleksi berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) BKN sebagai *tools* utama yang akan digunakan dalam rekrutmen CPNS tahun 2019. Formasi yang dibuka dalam CPNS tahun 2019 sebanyak 197.117 dengan rincian : Instansi Pusat 37.854 formasi (74 K/L) dan Instansi Daerah 159.257 formasi (467 Pemda).

Sementara itu di seluruh Daerah Istimewa DI Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 575 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 total sebanyak 3.086 yang terdiri dari Pemerintah DIY sebanyak 718, Kota Yogyakarta sebanyak 419, Kab. Bantul sebanyak 601, Kab. Sleman sebanyak 643, Kab. Gunung Kidul sejumlah 345 dan Kab. Kulon Progo sebanyak 360.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta ini berjumlah 15 orang anggota yang dipimpin oleh Yth. **Bpk. H. Moh. Arwani Thomafi** (Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PPP dan anggota Tim terdiri dari:

NO.	NO. ANGGT	N A M A	KETERANGAN
1.	A-210	Arif Wibowo	Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F- PDI-P

2.	A-195	Drs. H. Heru SUDj atmoko, M.Si	Anggota/F- PDIP
3	A-263	Komarudin Watubun, SH.,MH	Anggota/F- PDIP
4.	A-186	Paryono, SH.MH	Anggota/F-PDIP
5.	A-199	M. Prakosa	Anggota/F-PDIP
6.	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA	Anggota/F-PG
7.	A-283	Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S	Anggota/F- PG
8.	A-75	H. Ahmad Muzani	Anggota/F- Gerindra
9.	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/F- Gerindra
10.	A-376	Aminurokhman, S.E.,M.M.	Anggota/F- Nasdem
11.	A-370	Lestari Moerdijat	Anggota/F- Nasdem
12.	A-30	H. Sukanto, SH	Anggota/F- PKB
13.	A-538	H. Agung Budi Santoso, SH.,MM	Anggota/F- PD
14.	A-428	H. Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/F- PKS

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, TV Parlemen dan Pemberitaan DPR RI

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 dan telah mengadakan pertemuan dengan Kepala BKN RI dan Kantor Regional I BKN Provinsi DI Yogyakarta.

C. HASIL KUNJUNGAN

1. Persiapan Kantor Regional I BKN DI Yogyakarta dalam penerimaan CPNS Tahun 2019:

a. Persiapan Internal :

- 1) Koordinasi dengan Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN Pusat;
- 2) Menyiapkan Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai Petugas CAT;
- 3) Mengadakan Pelatihan – Pelatihan Kepada Petugas CAT;
- 4) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Tim CAT.

b. Persiapan Eksternal

- 1) Koordinasi dengan Instansi terkait terkait Titik Lokasi, Sarana Prasarana dan penjadwalan;
 - 2) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja terkait Persiapan Seleksi CPNS Tahun 2019.
 - 3) Menyelenggarakan simulasi SKD dengan CAT bagi masyarakat di beberapa area *Car Free Day* serta di UPT dan Kanreg.
2. Koordinasi Kantor Regional I BKN DI Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan CPNS Tahun 2019 :
- a. Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Validasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pemerintah Daerah;
 - c. Pendampingan pengisian e – formasi.
3. Jumlah Formasi Umum Wilayah Jawa Tengah dan DIY, sebanyak 18.470
- Dari formasi umum ini kan dipecah lagi ke formasi khusus yaitu Formasi Cumlaude dan Formasi Disabilitas.
- Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/ *Cumlaude*
- Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV).
 - Instansi Pusat wajib mengalokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari total alokasi formasi, Instansi Daerah dapat mengalokasikan, sesuai dengan kebutuhan;
- Formasi Disabilitas
- Instansi Pusat dan Instansi Daerah harus mengalokasikan formasi/jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas paling sedikit 2 (dua) persen dari total formasi yang ditetapkan oleh Menteri;
 - Pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kebutuhan organisasi, persyaratan jabatan, jenis dan derajat kedisabilitasannya, serta kesiapan sarana prasarana/aksesibilitas di masing-masing instansi ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan (formasi) dari Menteri
4. Persiapan Sarana Prasarana untuk Pelamar Disabilitas
- Aplikasi CAT khusus Tuna Netra – *Earphone*
 - Petugas pendamping
 - Kursi Roda

- Akses Jalan
- Poliklinik
- Tenaga kesehatan

5. Hambatan – hambatan yang ditemui Kantor Regional I BKN DI Yogyakarta dalam proses perencanaan, seleksi administrasi, kompetensi dasar dan kompetensi bidang:

- a. Waktu yang terbatas;
- b. Penyelenggaraan seleksi yang bersifat mandiri instansi, membuat instansi kurang siap sehingga bekerjasama dengan perguruan tinggi (bersifat swakelola) berdampak lokasites jauh dari instansi yang dilamar
- c. Penetapan formasi yang tidak spesifik didalam kualifikasi pendidikan;
- d. Penentuan titik lokasi pelaksanaan seleksi cpns 2019 yang bersifat mandiri, membutuhkan sumber daya manusia aparatur yang besar.

6. Untuk soal adalah sama dari konsorsium namun ada beberapa tingkat kesulitan disesuaikan keadaan SDM di daerah tersebut. Hanya saja mana daerah yg sulit dan mana yg mudah tidak akan dipublikasikan (menjadi rahasia di PANSELNAS).

7. Antisipasi Kantor Regional I BKN DI Yogyakarta terhadap keluhan instansi terkait jumlah formasi, kualifikasi pendidikan, unit kerja, penempatan yang tidak sama :

- a. Meneruskan keluhan terkait jumlah formasi ke Menpan;
- b. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, Kantor regional I BKN mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dengan Narasumber dari BKN Pusat jakarta. Selain itu Kantor Regional I BKN DI Yogyakarta juga membentuk tim pembahasan kualifikasi pendidikan dan selalu berkoordinasi dengan BKN Pusat Jakarta dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
- c. Terkait dengan unit kerja penempatan yang tidak sama, Penetapan NIP CPNS dengan menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan SAPK sehingga penempatan unit kerja sesuai dengan formasi. Setelah NIP ditetapkan, Kantor Regional I BKN akan menugaskan pejabat Auditor Kepegawaian untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian kepegawaian untuk memverifikasi kesesuaian antara SK yang telah ditetapkan dengan riil penempatan yang bersangkutan.

7. Masa Sanggah, dengan data sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Pelamar yang TMS | : 41.377 |
| - Pelamar Yang menyanggah | : 19.625 (47,42%) |

- Sanggahan yang dijawab menjadi MS : 2.050 (10,44%)

8. Terkait masalah teknis administrasi, peralatan dan perlengkapan untuk penerimaan CPNS Tahun 2019 langsung berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN. Selain itu Kanreg I BKN Juga berkoordinasi dengan Instansi Daerah antara lain dengan survey lokasi test dan melakukan pemeriksaan sarpras sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 50 tahun 2019.
9. Antisipasi potensi kecurangan terkait manipulasi data yang lulus seleksi dalam setiap tahapan seleksi :
 - a. Pada saat seleksi berlangsung masyarakat dapat melihat live score peserta pada layar LCD Monitor
 - b. Peserta dapat melihat score ketika Test TKD selesa
 - c. Melaporkan hasil seleksi setiap sesi dengan menggunakan aplikasi ke Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN;
 - d. Mencetak dan menempelkan hasil seleksi setiap seksi dengan disahkan oleh panitia instansi dan panitia dari Kantor Regional I BKN.
10. Hasil evaluasi Kantor Regional I BKN DI Yogyakarta terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2018 :
 - a. Masalah teknis administrasi :
 - 1) Standarisasi antara Kantor Regional dan Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN terkait pelaporan apa saja yang harus dilampirkan.
 - 2) Koordinasi antara Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN, Kantor Regional I BKN dan instansi terkait penjadwalan (pelaksanaan seleksi) → harus sudah ada jadwal.
 - b. Peralatan dan perlengkapan dalam penerimaan CPNS :
 - 1) Waktu pengadaan peralatan dan perlengkapan perlu ditambah;
 - 2) Harus ada standarisasi peralatan dan perlengkapan
 - 3) Seharusnya ada gedung yang standar dengan daya tampung yang besar → tidak kebingungan mencari titik lokasi.
11. Dari pantauan kami evaluasi penurunan passing grade yang tadinya diatur dengan PermenPANRB No. 37 tahun 2018 menjadi PermenPANRB no 61 tahun 2018, memang ada kekecewaan dari peserta yang memenuhi passing grade dan masuk 3x formasi tapi tidak lolos CPNS atau P1/TL. Namun dengan diakomodirnya nilai dari P1/TL di penerimaan CPNS Formasi tahun 2019 ini, maka menurut kami adalah keputusan yang sangat tepat untuk menghargai mereka.

12. Tenaga honorer yang tidak terserap dalam penerimaan CPNS 2018 dan PPPK 2019 :
 - a. Disertakan dalam seleksi CPNS tahun 2019 (yang memenuhi persyaratan);
 - b. Memberikan penghasilan yang sesuai;
 - c. Memberikan pesangon.

SPESIFIKASI MINIMAL SARANA DAN PRASARANA UNTUK PELAKSANAAN SELEKSI (Berdasarkan Peraturan BKN No. 50 Tahun 2019)

1. Server

- a. Processor Intel Xeon CPU @2,0 GH.
- b. Memory (RAM) 16 GB.
- c. OS Windows Server 2008 64 bit.
- d. Harddisk Drive (HDD) 500 Gb (High Speed) atau SSD 250 Gb.
- e. LAN Card Ethernet 1000 Mbps.
- f. Mouse dan Keyboard.
- g. Monitor ukuran 14".

2. Mobile Server

- a. Processor minimal i7 2,0 Ghz/setara.
- b. Memory (RAM) 16 GB.
- c. OS Windows Server 2008 64 bit.
- d. Harddisk Drive (HDD) 500 Gb (High Speed) atau SSD 250 Gb.
- e. LAN Card Ethernet 1000 Mbps.
- f. Mouse eksternal.

3. Komputer Client (Desktop atau Laptop) dengan spesifikasi setingkat:

- a. Processor Client 2.0 Ghz.
- b. Microsoft Windows XP, Vista,7,8, 10 atau Open Source/ Linux.
- c. Web Browser Google Chrome, Opera atau Mozilla Firefox (terbaru).
- d. Harddisk Drive (HDD) 120 Gb.

- e. Memori 2 GB (2000 Mb).
 - f. LAN CARD 100/1000 Mbps.
 - g. Mouse eksternal.
 - h. Keyboard dan Monitor (untuk PC Desktop ukuran 14").
- 4 Jaringan Lokal (local Networking) ke komputer client menggunakan kabel UTP LAN minimal category 5E, untuk jaringan antar switch menggunakan switch 1000 Mbps dan kabel UTPLAN minimal CAT 6 sesuai standar pabrikan industri yang disesuaikan dengan jumlah client
 - 5 Genset (tipe mobile genset minimal 80 KVA).
 - 6 UPS (Power Output 1 KVA tegangan 220 V).
 - 7 Liquid Crystal Display (LCD) TV untuk monitoring hasil tes berikut kabel data untuk menghubungkan ke komputer dan untuk memutar video petunjuk teknis di ruang tunggu, apabila tidak tersedia dapat diganti dengan LCD Proyektor.
 - 8 LCD Proyektor untuk pemaparan dan pengarahan tes dengan Metode CAT disediakan di dalam ruang tes.
 - 9 Scanner (Scan speed normal A4 8 ppm).
 - 10 Printer Laser dan Toner (Type Laser Printer Speed Min 20 ppm)
 - 11 Apabila dimungkinkan dapat disediakan Closed-Circuit television (CCTV) untuk merekam aktivitas peserta tes.
 - 12 Loker atau tempat penyimpanan barang milik peserta dan kursi tunggu.
 - 13 Ruang tes, ruang server dan administrator, ruang monitoring, ruang tunggu, ruang tempat penyimpanan barang milik peserta (loker), dan ruang registrasi peserta.
 - 14 Alat pemindai Barcode Scanner (USB Kit dan 2D).
 - 15 Alat pendeteksi logam.
 - 16 Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
 - 17 Alat pemadam kebakaran.

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait yang menjadi mitra Komisi II DPR RI sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2020

Ketua Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI

H. Moh. Ahmad Arwani Thomafi